

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum

Erwin (2010:141) menyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada lembaga perwakilan rakyat dan juga memilih Presiden dan Wakil Presiden termasuk memilih yang akan memimpin pemerintahan (eksekutif) setempat. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang biasa digunakan negara-negara di dunia dapat dibagi kedalam dua buah sistem pemilihan, yaitu:

1. Sistem pemilihan distrik

Pada sistem pemilihan ini, suatu negara membagi wilayahnya menjadi beberapa distrik (wilayah kecil) dan menentukan satu wakil tunggal berdasarkan suara terbanyak (mayoritas) dari setiap distriknya. Sistem pemilihan distrik memiliki empat karakteristik, diantaranya:

- a. *First past the post*, yaitu sistem yang menegakkan prinsip *single member district* (satu anggota distrik) dan pemilihan yang berpusat pada calon serta pemenangnya adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.
- b. *The two round system*, yaitu sistem yang menggunakan putaran kedua sebagai dasar untuk menentukan pemenang Pemilu.
- c. *The alternative vote*, yaitu sistem yang menerapkan para pemilih diberikan otoritas untuk menentukan prioritasnya dalam menentukan peringkat terhadap calon-calon yang ada.
- d. *Block vote*, yaitu sistem dimana para pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon-calon yang terdaftar tanpa melihat hubungan partai dari calon-calon yang ada.

Putri Noviyandari, 2014

*ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)*

2. Sistem pemilihan proporsional

Sistem pemilihan proporsional merupakan sistem yang dilihat dari jumlah penduduk yang terdaftar sebagai pemilih. Dalam sistem pemilihan ini, negara terbagi atas beberapa daerah pemilihan, dimana kursi yang diperebutkan untuk legislatif pusat dibagi kedalam daerah-daerah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk dari pemilihan tersebut.

2.2 Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, sesuai bunyi Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu, *“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”*. Pemilu di Indonesia juga telah diatur oleh UUD 1945 Pasal 22E, diantaranya:

1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang.

Putri Noviyandari, 2014

ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)

2.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat secara demokratis dan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bagian kedelapan pasal 56, yaitu “*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara unggul, yaitu lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen, maka yang ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yaitu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 25 persen dari jumlah suara sah. Apabila terdapat lebih dari satu pasangan calon yang memperoleh suara terbesar, maka yang ditetapkan sebagai calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas. Sedangkan jika tidak terdapat pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25 persen dari jumlah suara sah, maka harus dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua.

2.4 Quick Count

Proses perhitungan suara oleh lembaga resmi, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun sudah memakai sistem teknologi informasi yang canggih dan berbiaya mahal namun pada umumnya baru dapat diketahui dua minggu hingga satu bulan setelah pemilihan. Ini mengakibatkan beberapa

Putri Noviyandari, 2014

*ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)*

lembaga survei di Indonesia memilih untuk melakukan perhitungan cepat atau biasa disebut *Quick Count*.

Quick Count dilakukan pertama kali pada Pemilu tahun 1986 di Philipina dengan dua calonnya yaitu Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino. Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama *National Citizens Movement for Free Election* (NAMFREL) melakukan *Parallel Vote Tabulation* (PVT) yaitu pencatatan hasil penghitungan suara Pemilu. NAMFREL menemukan kecurangan pada Pemilu tersebut, yaitu manipulasi suara pada kemenangan Ferdinand Marcos sehingga dapat menggagalkan keputusan Pemilu yaitu kemenangan Ferdinand Marcos. Kemudian NAMFREL menunjukkan kemenangan dari Corazon Aquino. Sejak saat itu *Quick Count* dianggap sebagai pengontrol Pemilu untuk menegakkan Pemilu yang jujur dan adil.

Quick Count dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1997 oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada Pemilu terakhir kekuasaan Soeharto. Metode ini dilakukan secara rahasia dan dilakukan bersama salah satu ahli politik di Indonesia. LP3ES dapat memprediksi hasil Pemilu di DKI Jakarta secara akurat sama seperti hasil perhitungan suara oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada saat itu LP3ES tidak mempublikasikan hasilnya dengan alasan untuk keamanan politik. Pada pelaksanaan Pemilu tahun 1999, LP3ES kembali melakukan *Quick Count* di NTB dan Pulau Jawa, mereka berhasil memprediksi urutan partai beserta dengan persentase suaranya. Pada tahun 2004, LP3ES bekerja sama dengan lembaga internasional Amerika yang sudah terbiasa melakukan *Quick Count* yaitu *Natinal Democratic Institute for International Affairs* (NDI). Mereka berhasil memprediksi pemenang Pemilu dan komposisi pemenang Pemilu dari urutan 1 sampai 24. Seiring berjalannya waktu, metode yang digunakan dalam *Quick Count* semakin berkembang. Dengan menggunakan prinsip dasar statistika, penyelenggara *Quick Count* tidak perlu menempatkan orang di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Putri Noviyandari, 2014

ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)

Menurut Wikipedia, *Quick Count* adalah sebuah metode verifikasi hasil Pemilihan Umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil Pemilu di TPS yang dijadikan sampel. *Quick Count* dapat menghasilkan gambaran hasil perolehan suara secara cepat dan akurat karena *Quick Count* dilakukan langsung dari TPS terpilih, bukan dari pandangan atau pendapat warga. Metode ini dilakukan selain untuk meminimumkan biaya dan mempercepat hasil perhitungan suara, juga dapat dijadikan pembanding hasil perhitungan suara dari KPU. Para pendukung calon pun tidak kesulitan dalam mencari informasi perkembangan hasil suara calon. Hal ini juga dapat mencegah pemicu terjadinya kecurangan dalam Pemilu yaitu manipulasi data hasil perhitungan suara.

2.5 Penyelenggaraan *Quick Count*

Quick Count merupakan prediksi hasil perhitungan suara Pemilu berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini warga. Menurut Sumargo (2006), keberhasilan pelaksanaan *Quick Count* ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Syarat, yaitu adanya akses ke TPS, kredibilitas dan independensi, jaringan di akar rumput (*grass root*), dan dukungan komunikasi data.
2. Pelatihan, seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan ini diberi pelatihan.
3. *Quality control*, yaitu adanya beberapa penjaminan kevalidan data, diantaranya:
 - a. Relawan diminta untuk melakukan validasi hasil pencatatan perolehan suara.
 - b. Validasi dilakukan dengan meminta tandatangan ketua TPS yang dipantau.
 - c. Satu minggu sebelum hari Pemilu dilaksanakan dilakukan monitoring untuk memastikan apakah proses persiapan pemantauan berjalan sebagaimana seharusnya.
 - d. Memastikan apakah data yang diperoleh adalah benar dan valid dengan *spotcheck*.
 - e. Daerah ataupun TPS yang dikunjungi untuk *spotcheck* dipilih secara acak.

Jaringan Suara Indonesia (JSI) merupakan salah satu lembaga resmi penyelenggaraan *Quick Count* memiliki cara sendiri untuk melakukannya.

Putri Noviyandari, 2014

ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)

Terdapat dua tahapan penting dalam proses *Quick Count* yang dilaksanakan oleh JSI, yaitu tahapan perencanaan frame dan tahapan pelaksanaan lapangan. Pada tahapan perencanaan frame, meliputi tiga tahap, yaitu:

1. Penentuan jumlah sampel TPS, dengan mempertimbangkan geografis dan keragaman populasi pemilih dan TPS, dapat diestimasi berapa jumlah sampel optimum yang mampu memprediksi parameter populasi.
2. Mengalokasikan sampel TPS di tiap-tiap kabupaten atau kota secara proposional.
3. Menentukan sampel TPS terpilih, diawali dengan mengurutkan kelurahan atau desa di tiap-tiap kota atau kabupaten berdasarkan arah mata angin, utara ke selatan serta timur ke barat, selanjutnya pemilihan TPS sampel di tiap kelurahan atau desa secara sistematis sampling dengan menentukan satu sampel TPS terpilih sebagai titik awal lalu melompat dengan interval tertentu menuju sampel TPS berikutnya, langkah ini dilakukan sebanyak alokasi sampel TPS yang diperlukan sehingga sampai tahapan ini diperoleh daftar sampel TPS yang siap untuk didatangi oleh petugas lapangan.

Tahapan berikutnya yaitu JSI menempatkan petugas lapangan di sampel TPS yang telah ditentukan. Mereka akan ditugaskan di tiap-tiap sampel TPS terpilih, dengan mengirimkan data hasil perhitungan suara di TPS tersebut menggunakan *Short Message Service* (SMS). Kemudian data hasil perhitungan di sejumlah sampel TPS yang berhasil dikirim melalui SMS akan disusun di pusat data JSI sampai menghasilkan data persentase suara tiap calon, persentase per wilayah zona, juga persentase tingkat partisipasi rakyat.

Selanjutnya JSI harus menjaga kualitas data (validitas data) yang masuk ke pusat data dari para petugas lapangan, untuk tujuan ini dilakukan proses *quality control* dengan mendatangi sejumlah sampel TPS (*spotcheck*) sebanyak 20% dari total sampel TPS.

Seluruh rangkaian tahapan *Quick Count* ini bertujuan untuk menghasilkan sampel TPS yang valid. Tidak semua TPS dihitung namun hanya sebagian saja sehingga hasil perhitungan ini tidak luput dari toleransi kesalahan

Putri Noviyandari, 2014

ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)

(*margin of error*). Toleransi kesalahan dengan alokasi sampel optimum di sejumlah TPS terpilih kurang lebih 1% pada selang kepercayaan 99%.

2.6 Populasi

Menurut Supranto (1992:3), populasi ialah kumpulan yang lengkap dari seluruh elemen yang sejenis, tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:117-118), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya mengenai orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Terdapat dua macam populasi, yaitu:

1. Populasi terbatas, yaitu populasi yang sumber datanya jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.
2. Populasi tidak terbatas, yaitu populasi yang sumber datanya tak dapat ditentukan batasnya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Oleh karena itu, luas populasi bersifat tidak terbatas dan hanya dapat dijelaskan secara kualitatif.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, populasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Populasi dikatakan homogen, apabila anggota populasi tersebut memiliki sifat atau keadaan yang sama sehingga tidak perlu mempermasalahkan jumlahnya secara kuantitatif.
2. Populasi dikatakan heterogen, apabila anggota populasi tersebut memiliki sifat atau keadaan yang berbeda atau bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya secara kuantitatif ataupun secara kualitatif.

2.7 Sampel

Putri Noviyandari, 2014

*ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)*

Menurut Wikipedia, sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya dapat mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan ukuran sampel, yaitu:

1. *Degree of homogeneity* dari populasi, semakin homogen populasi maka semakin sedikit jumlah sampel yang diambil
2. Presisi yang dikehendaki, semakin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki maka semakin banyak jumlah sampel yang diambil
3. Rencana analisa
4. Tenaga
5. Biaya
6. Waktu

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi, artinya sampel harus valid. Sampel yang baik ditentukan oleh dua faktor, yaitu:

1. Akurasi

Akurasi atau ketepatan merupakan tingkat ketidakadaan kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, semakin akurat sampel tersebut. Tolak ukur adanya kekeliruan adalah populasi. Cooper dan Emory (dalam Mustafa, 2000) menyebutkan bahwa "*There is no systematic variance*" yang maksudnya adalah tidak ada keragaman pengukuran yang disebabkan karena pengaruh yang diketahui atau tidak diketahui, yang menyebabkan skor cenderung mengarah pada satu titik tertentu.

Banyak contoh kasus dari *systematic variance* dalam *Quick Count* yang dilakukan oleh *Literary Digest* (sebuah majalah di Amerika yang terbit tahun 1920-an). Mulai tahun 1920, majalah ini berhasil memprediksi siapa yang akan jadi Presiden dari calon-calon Presiden yang ada. Sampel diambil berdasarkan petunjuk dalam buku telepon dan dari daftar pemilik mobil. Pada tahun 1936,

Putri Noviyandari, 2014

**ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)**

prediksinya salah yaitu berdasarkan hasil *Quick Count*, di antara dua calon Presiden (Alfred M. Landon dan Franklin D. Roosevelt), yang akan menang adalah Landon, namun salah karena ternyata Roosevelt yang terpilih menjadi Presiden Amerika.

Setelah diteliti, ternyata *Literary Digest* membuat kesalahan dalam menentukan sampel penelitiannya. Sampel yang diambil adalah pemilih yang memiliki telepon dan mobil, akibatnya pemilih yang tidak memiliki telepon dan mobil (kelas rendah) tidak terwakili, padahal Roosevelt lebih banyak dipilih oleh masyarakat kelas rendah tersebut. Menurut Nan Lin (dalam Mustafa, 2000), dari kejadian tersebut terdapat dua pelajaran yang dapat diperoleh, yaitu:

- a. Keakuratan prediktibilitas dari suatu sampel tidak selalu bisa dijamin dengan banyaknya jumlah sampel
- b. Agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi.

2. Presisi

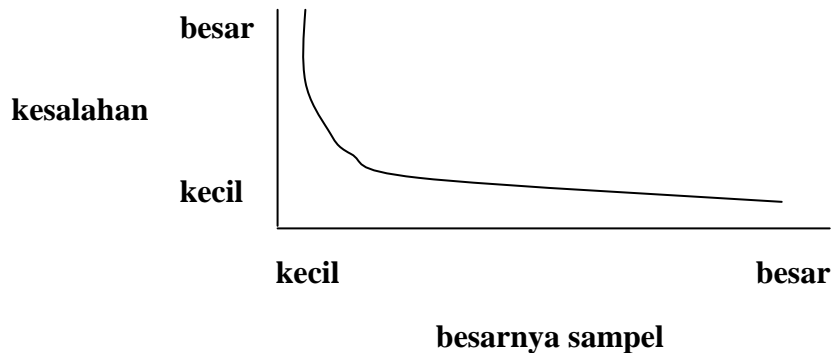
Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana penaksiran dengan karakteristik populasi. Semakin kecil tingkat perbedaan di antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel, maka semakin tinggi tingkat presisi sampel tersebut.

Tidak pernah ada sampel yang dapat mewakili karakteristik populasi sepenuhnya. Oleh karena itu dalam setiap penarikan sampel ini tidak luput dari keasalahan, yang dikenal dengan nama *sampling error*. Presisi diukur oleh kekeliruan baku (*standard error*). Semakin kecil perbedaan di antara kekeliruan baku yang diperoleh dari sampel dengan kekeliruan baku dari populasi semakin tinggi pula tingkat presisinya. Menurut Kerlinger (dalam Mustafa, 2000), walau tidak selamanya, tingkat presisi mungkin bisa meningkat dengan cara menambahkan jumlah sampel, karena kesalahan mungkin bisa berkurang kalau jumlah sampelnya ditambah.

Putri Noviyandari, 2014

ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)

Di bawah ini digambarkan hubungan antara jumlah sampel dengan tingkat kesalahan seperti yang diutarakan oleh Kerlinger (dalam Mustafa, 2000).



Gambar 2.1 Hubungan Besarnya Sampel dan Tingkat Kesalahan

2.8 Metode Sampling

Menurut Wikipedia, metode sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Metodologi ini diperlukan agar didapatkan sampel yang baik yaitu sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasinya. Dalam pengambilan sampel, ada beberapa pengertian yang perlu diketahui, antara lain:

1. Populasi sasaran (target populasi), yaitu populasi yang menjadi sasaran pengamatan atau populasi dimana suatu keterangan akan diperoleh.
2. Kerangka sampel (*sampling frame*), yaitu suatu daftar unit-unit yang ada pada populasi yang akan diambil sampelnya atau daftar anggota populasi.
3. Unit sampel (*sampling unit*), yaitu unit terkecil pada populasi yang akan diambil sebagai sampel.
4. Rancangan sampel, yaitu rancangan yang meliputi cara pengambilan sampel dan penentuan besar sampelnya.

Metode sampling ini dibagi menjadi dua, yaitu sampling probabilitas dan sampling non probabilitas.

1. Sampling Probabilitas

Putri Noviyandari, 2014

ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)

Sampling probabilitas adalah metode sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Metode sampling probabilitas terdiri dari:

a. Sampling acak sederhana (*Simple Random Sampling*)

Pada metode ini, proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Proses memilih sejumlah anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Metode ini dilakukan jika populasinya bersifat homogen.

b. Sampling berstrata (*Stratified Random Sampling*)

Sampling berstrata merupakan suatu metode sampling dimana populasi dibagi kedalam sub populasi (strata). Metode ini dilakukan karena populasi bersifat heterogen. Peneliti harus terlebih dahulu memahami karakteristik anggota populasinya. Selanjutnya dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya agar populasi di setiap strata bersifat homogen.

c. Sampling Berkelompok (*Cluster Sampling*)

Metode ini dilakukan jika populasinya bersifat homogen. Sehingga pengelompokan populasinya mudah dilakukan, yaitu dapat dilakukan secara *random* (acak). Pada dasarnya metode ini hampir sama dengan sampling acak berstrata, tetapi penarikan sampel pada metode ini tidak langsung ke elemen, tetapi terlebih dahulu melalui kelompok elemen.

2. Sampling Non Probabilitas

Sampling non probabilitas yaitu suatu metode pengambilan sampel secara tidak acak (*non random sampling*). Tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dipilih menjadi sampel. Anggota populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Hasil yang dihasilkan pun hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Metode ini digunakan biasanya karena biaya penelitian yang sangat sedikit, hasilnya

Putri Noviyandari, 2014

*ANALISIS QUICK COUNT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SAMPLING BERKELOMPOK
(STUDI KASUS PEMILU WALIKOTA BANDUNG 2013)*

diminta segera, dan tidak memerlukan ketepatan yang tinggi. Terdapat empat metode sampling dalam sampling non probabilistik ini, yaitu:

a. *Convenience Sampling*

Convenience sampling merupakan metode dalam memilih sampel dimana peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan dan kebetulan saja. Oleh karena itu, beberapa penulis menggunakan istilah *accidental sampling* atau *captive sampling*. Penarikan sampel dalam metode ini dilakukan dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemui saja. Beberapa kasus penelitian yang menggunakan jenis sampel ini, hasilnya ternyata kurang obyektif.

b. *Snowball Sampling*

Snowball sampling merupakan metode sampling yang digunakan ketika peneliti tidak banyak mengetahui tentang informasi populasi penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti menginginkan lebih banyak sampel, dia meminta kepada sampel pertama untuk menunjukkan orang lain yang dapat dijadikan sampel. Dengan kata lain, satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya.

c. *Purposive Sampling*

Purposive sampling merupakan metode sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Metode ini membutuhkan pengetahuan yang baik tentang populasi penelitiannya. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan yang diinginkan peneliti atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki atau mengetahui informasi

yang diperlukan bagi penelitian yang dia buat. Untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai anggota sampel, maka peneliti harus mengetahui dan beranggapan bahwa orang yang dipilihnya dapat memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan masalah penelitiannya. Pengambilan sampel ini dapat dibagi dua yaitu judgment sampling dan quota sampling:

- 1) *Judgment sampling* yaitu metode pengambilan sampling dimana sampel yang dipilih berdasarkan penilaian peneliti terhadap seseorang yang paling baik jika dijadikan sampel penelitiannya.
- 2) *Quota sampling* yaitu metode pengambilan sampling dalam bentuk strata secara proposional, namun tidak dipilih secara acak melainkan secara kebetulan saja.

d. *Haphazard Sampling*

Haphazard sampling merupakan metode sampling dimana satuan sampling dipilih sembarangan atau seadanya, tanpa perhitungan apapun. Dalam metode ini, penarikan sampel dilakukan karena kemauan sendiri si penelitinya saja.